

MENGGALANG PERSATUAN BANGSA INDONESIA

Kirdi DIPOYUDO

Sumpah Pemuda *satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa*, hasil Kongres Pemuda Indonesia ke-II tanggal 27-28 Oktober 1928, biarpun pada waktu itu lebih merupakan cita-cita daripada kenyataan, adalah sangat penting bagi pergerakan nasional Indonesia karena dapat dipandang sebagai lahirnya bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia (lihat lampiran). Sumpah itu adalah suatu semboyan yang mengobarkan semangat kebangsaan dan sekaligus suatu program kerja untuk mewujudkan Indonesia Merdeka yang dicita-citakan. Dengan maksud itu akan ditingkatkan usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan seluruh penduduk Nusantara. Di antara mereka akan ditanamkan dan dibina kesadaran nasional yang kuat.

Akan tetapi perjuangan itu tidaklah mudah. Pada tahun 1920-an ketika pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia mulai menuntut kemerdekaan, mereka berbicara tentang bangsa Indonesia yang telah bertekad untuk membebaskan diri dari dominasi kolonial. Namun kenyataannya adalah berlainan. Penduduk Indonesia yang mereka wakili terdiri atas berbagai kelompok etnis yang masing-masing dapat disebut bangsa. Kelompok-kelompok itu belum merupakan suatu kesatuan yang bulat. Adalah sangat sulit untuk menemukan apa yang lazim dipandang sebagai model suatu bangsa seperti dibatasi oleh

Rupert Emerson: "Model ideal bangsa adalah satu rakyat yang secara tradisional menetap di wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya, memakai bahasa yang sama dan seyogyanya bahasa mereka sendiri, memiliki suatu kebudayaan sendiri, dan mendapatkan suatu bentuk bersama berkat banyak generasi pengalaman sejarah bersama."¹

Pada waktu itu penduduk Indonesia belum merupakan suatu bangsa serupa itu, tetapi terdiri atas kelompok-kelompok etnis yang masing-masing memiliki ciri-ciri itu dan oleh sebab itu dapat dipandang sebagai bangsa. Orang-orang Jawa misalnya merupakan satu bangsa, yang mempunyai ciri-ciri rasial, sejak dahulu menetap di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memakai bahasa mereka sendiri, mempunyai kebudayaan mereka sendiri dan mendapatkan suatu bentuk bersama berkat banyak generasi pengalaman sejarah bersama. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Minangkabau, Bali, Bugis, Sunda, Melayu dan lain-lain. Masing-masing kelompok itu mempunyai bahasanya sendiri, wilayahnya sendiri, nilai-nilai dan norma-norma atau adat istiadatnya sendiri, susunan politiknya sendiri, arsitekturnya sendiri, tari-tarian dan lagu-lagunya sendiri, filsafat dan literturnya sendiri, dan biasanya juga agamanya sendiri. Dengan perkataan lain masing-masing kelompok itu adalah suatu bangsa tersendiri, sehingga penduduk Indonesia terdiri atas berbagai bangsa.²

Hal itu sesuai dengan pengertian Ernest Renan yang banyak dikutip: "Suatu bangsa ialah jiwa, suatu asas rohani. Dua hal yang sesungguhnya hanya berwujud satu (yang) membentuk jiwa (atau) asas rohani itu. Yang satu terdapat dalam waktu yang telah silam, yang lain dalam waktu sekarang. Yang satu yakni memiliki bersama warisan kenang-kenangan yang kaya raya; yang lain ialah persetujuan sekarang, *keinginan untuk hidup bersama*, kehendak untuk terus mempergunakan warisan yang

-
1. Disalin dari Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Boston, 1962), hal. 103
 2. Lihat Harsja W. Bachtiar, *The Indonesian Nation. Some Problems of Integration and Disintegration* (Singapura, 1974), hal. 19-20

ANALISA

diterima secara tidak terbagi itu.”¹ Dengan perkataan lain, suatu bangsa dihimpun oleh suatu warisan budaya bersama dan citra-citra yang berakar pada ingatan para warganya. Bangsa itu juga dihimpun oleh suatu tekad bulat para warganya untuk hidup bersama sebagai satu masyarakat.

Komposisi penduduk Indonesia dan kekuatan masing-masing kelompok komponennya dapat dilihat pada tabel berikut:

SUKU SUKU BANGSA INDONESIA			
No.	Suku bangsa		
		1930	1971
1.	Jawa	27.808.623	54.750.710
2.	Sunda	8.594.834	17.232.180
3.	Madura	4.305.862	8.532.977
4.	Minangkabau	1.988.648	3.897.130
5.	Bugis	1.533.035	3.073.625
6.	Batak	1.207.514	2.420.420
7.	Bali	1.111.659	2.228.789
8.	Jakarta	980.863	1.866.575
9.	Melayu	953.397	1.811.525
10.	Banjar	898.884	1.702.192
11.	Aceh	831.321	1.666.750
12.	Palembang	770.917	1.545.647
13.	Sasak	659.477	1.322.211
14.	Dayak	651.720	1.208.608
15.	Makassar	642.720	1.208.608
16.	Toraja	557.590	1.117.944
17.	Manado	281.599	564.587
18.	Lain-lain	5.542.332	10.111.960
	Jumlah	59.138.067	116.429.831

Catatan: Angka-angka untuk tahun 1930 adalah hasil sensus 1930, tetapi sejak Proklamasi Kemerdekaan sensus-sensus tidak mengumpulkan angka-angka untuk suku bangsa masing-masing. Namun dengan asumsi bahwa laju pertumbuhannya sama — kenyataannya laju pertumbuhan itu tidak sama — dapat diadakan suatu perhitungan untuk mendapatkan angka-angka kasar

¹ Dikutip dari Ernest Renan, *Apakah Bangsa itu?* (Jakarta, 1968), hal. 35. Salinan Prof. Sunario dari pidatonya di Universitas Sorbonne 11 Maret 1882 yang berjudul *Qu'est ce qu'une nation?*

mengenai besarnya suku bangsa masing-masing. Angka-angka untuk tahun 1971 itu adalah hasil perhitungan yang didasarkan atas hasil sensus 1930 dan atas asumsi bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 itu adalah sekitar 116,5 juta. ¹

Dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yang akan meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan segenap penduduknya, salah satu tugas pokok yang dihadapi pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia ialah menggalang persatuan sekian banyak bangsa itu menjadi satu bangsa. Dalam hal ini mereka mengalami banyak kesulitan, khususnya karena pemerintah kolonial, untuk mempertahankan kekuasaannya, menjalankan politik "divide et impera", politik memecah belah, antara lain dengan mengutamakan bangsa yang satu atas bangsa yang lain, menimbulkan dan membina semangat kecurigaan dan pertentangan antar bangsa.

Pada bangsa-bangsa itu perlu ditanamkan dan dikembangkan kesadaran bahwa mereka merupakan satu bangsa atau kesadaran nasional. Dalam rangka itu didirikan perkumpulan-perkumpulan sebagai pusat-pusat untuk membina dan memperluas kesadaran nasional. Secara demikian muncullah Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Studie Club, Partai Nasional Indonesia, Parindra dan lain sebagainya. Mula-mula pergerakan itu terutama bermaksud memajukan kehidupan kebangsaan, memperbaiki tingkat hidup rakyat, memajukan pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi semuanya itu mau tak mau menjurus ke nasionalisme Indonesia, yang menuju eksistensi politik tersendiri dengan hak untuk menentukan dan mengatur nasib sendiri seluas-luasnya.² Nasionalisme tidak puas dengan pemerintahan sendiri yang parsial, tetapi selalu memperjuangkan pemerintahan sendiri yang lengkap. Aspirasi pertama nasionalisme adalah perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional dalam bidang politik atau negara nasional.

1 Lihat *Volkstelling 1930* (Batavia, 1933-1936); lihat juga Harsja W. Bachtiar, *op. cit.*, hal. 12

2 Mengenai pergerakan nasional Indonesia lihat buku A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta, 1970)⁷

ANALISA

Faktor-faktor yang menunjang pergerakan nasional antara lain ialah kesatuan bahasa, agama, kebudayaan dan wilayah. Di samping faktor-faktor obyektif itu terdapat juga faktor-faktor subyektif seperti kesukaran-kesukaran bersama, penderitaan bersama, pengorbanan bersama dan adanya pahlawan-pahlawan bangsa yang melawan dominasi asing. Semuanya itu bisa menimbulkan kesadaran senasib, se-kepentingan dan sepenanggungan, yang lambat laun berkembang menjadi kesadaran nasional, menjadi nasionalisme. Nasionalisme ini pada gilirannya adalah suatu gerakan sosial, suatu aliran rohani yang menghimpun orang-orang menjadi satu bangsa, yang membangkitkan massa ke dalam keadaan sosial dan politik yang aktif. ¹

Nasionalisme sebagai ungkapan kesadaran nasional mengandung cita-cita yang merupakan inspirasi yang merangsang dan mendorong suatu bangsa ke arah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya, untuk menjadi negara nasional. Dalam proses itu dapat kita bedakan berbagai tahap perjuangan: (1) perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang mencakup persatuan politik, ekonomi, sosial serta budaya dan adanya solidaritas; (2) perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan nasional yang mencakup kebebasan dari dominasi asing dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional seperti kesukuan, kedaerahan dan sebagainya; (3) perjuangan untuk mewujudkan kepribadian, keaslian dan kekhususan yang membedakan suatu bangsa dari bangsa-bangsa lain; dan (4) perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang mencakup perjuangan untuk mendapatkan kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh. ²

Dalam pergerakan nasional Indonesia kombinasi faktor-faktor obyektif dan subyektif itu berhasil menimbulkan kesadaran nasional yang semakin meluas dan semakin kuat di antara penduduk Indonesia. Dari pemimpin-pemimpin pergerakan dia lambat laun merembes ke lingkungan yang lebih luas di seluruh Nusantara. Secara demikian timbullah keinginan dan perjuangan-

1 Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung, 1967), hal. 108-115

2 *Ibid.*

an rakyat Indonesia untuk hidup sebagai satu bangsa, mengembangkan satu kebudayaan, memperbaiki nasib dan akhirnya untuk membentuk satu negara nasional yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan semua kelompok etnis yang sebelumnya merupakan bangsa-bangsa sendiri.¹

Dalam proses itu Sumpah Pemuda telah memegang peranan penting dan menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia. Di satu pihak peristiwa itu mengungkapkan suatu tekad untuk menghimpun semua kelompok etnis menjadi satu bangsa, dan di lain pihak menjadi dorongan yang kuat untuk meningkatkan perjuangan guna mencapai persatuan dan kesatuan nasional sebagai syarat mutlak bagi pembentukan Indonesia Merdeka. Secara demikian kesadaran nasional yang telah tumbuh dan merata menjadi semakin tebal dan meluas di kalangan penduduk yang tersebar di seluruh kepulauan. Dengan perkataan lain, Sumpah Pemuda tahun 1928 itu ternyata menjadi ungkapan nasionalisme dan sekaligus bahan bakar yang akan semakin mengobarkannya. Dalam semangat itu kesukaran-kesukaran yang timbul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan lambat laun dapat diatasi, sehingga cita-cita "satu bangsa" makin lama makin kuat dan menjadi kenyataan yang makin besar.²

Khususnya pernyataan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia memainkan peranan penting dalam kebangkitan dan perkembangan nasional itu. Berkat pernyataan itu Indonesia tidak mengenal masalah bahasa nasional yang parah seperti berbagai negara lain biarpun terdapat sekian banyak suku bangsa dan bahasa. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia sekitar bahasa nasional tidak menimbulkan perpecahan dan bentrokan-bentrokan berdarah yang misalnya terjadi di India.

- 1 Lihat antara lain pidato Muhammad Yamin "Kebangunan (Renaissance) Bangsa Indonesia", dalam *Kerapatan Besar Indonesia Muda yang ke-I, 29 Desember 1930 - 2 Januari 1931 (1931)*
- 2 Mengenai arti Sumpah Pemuda bagi pergerakan nasional Indonesia antara lain lihat Prof. Sunario, "Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional", dalam *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta, 1974), hal. 277-289; dan karangan Abdurachman Surjomihardjo, "Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya-Politik Indonesia 1900-1945", *ibid.*, hal. 291-304

Masalah bahasa persatuan yang juga timbul dalam pergerakan nasional Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang cukup singkat. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di antara sekian banyak bahasa itu manakah yang akan dijadikan bahasa nasional? Beberapa bahasa seperti di Swiss atau satu saja seperti di kebanyakan negara? Para pemimpin nasionalis menyadari bahwa dalam kehidupan bangsa dan negara kesatuan bahasa atau bahasa persatuan adalah sangat penting. Mereka menyadari bahwa bahasa persatuan dapat menunjang usaha mempersatukan seluruh penduduk Indonesia dan membina persatuan itu. Sesuai dengan itu mereka akhirnya sepakat untuk menerima satu bahasa nasional dan dengan maksud itu memilih bahasa Melayu: "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sejak itu bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dan disebut bahasa Indonesia.¹

Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan Indonesia karena berbagai alasan. Pertama, bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi penduduk Indonesia, baik antara mereka maupun dengan orang-orang asing. Dia bahkan telah berkali-kali menjadi bahasa kebudayaan dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama-agama yang memasuki Indonesia. Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611) seorang penulis Belanda dalam kisah perjalanannya antara lain menulis: "Ketika kota itu (Malaka), berkat letaknya yang baik, telah menjadi pelabuhan yang terpenting di Asia Tenggara, bahasanya yang disebut bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa pergaulan yang sopan dan bahasa yang paling cocok di antara semua bahasa di Timur Jauh." Kedua, bahasa Melayu adalah lebih sesuai dengan jiwa kebangkitan baru, jiwa persatuan yang demokratis, daripada bahasa Jawa. Lagi pula susunan kata-kata dan kalimatnya sederhana dan tepat, sehingga mudah digunakan sebagai bahasa pergaulan. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan dalam pergerakan nasional itu untuk menyesuaikan bahasa Jawa dengan tuntutan jaman, khususnya dalam

¹ Lihat karya Zuber Usman, *Bahasa Persatuan* (Jakarta, 1970), hal. 9/; lihat juga Umar Junus, *Sejarah dan Perkembangan ke arah Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1969), khususnya hal. 24-39

bentuk demokratisasi, tidak berhasil. Bahasa Jawa dalam keadaannya waktu itu tidak sesuai dengan tujuan dan haluan perkumpulan yang memperjuangkan penghimpunan semua golongan dalam satu bangsa, lagi pula kurang selaras dengan jiwa demokrasi. Pemimpin-pemimpin nasional dari suku Jawa menginsyafi kelemahan-kelemahan itu dan dengan rela melepaskan bahasa mereka dari kesempatan untuk menjadi bahasa persatuan Indonesia. Untuk membina jiwa persatuan yang lebih luas dan membina semangat demokrasi, maka bahasa Jawa dilepaskan dan sebagai gantinya dipilih bahasa Melayu.¹

Sejak Sumpah Pemuda itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional Indonesia, antara lain dalam penerbitan-penerbitan, dalam pers, dalam perkumpulan-perkumpulan, dalam perdagangan, di kantor-kantor dan sekolah-sekolah serta dalam pergaulan antar suku sehari-hari. Pendudukan Jepang tahun 1942-1945 ikut mempercepat proses itu. Karena keberatan politis bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi pemerintahan kolonial Belanda tidak boleh dipakai lagi dan sebagai gantinya digunakan bahasa Indonesia, terutama dalam penerbitan dan pers, pada instansi-instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah. Dengan demikian dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga digunakan bahasa Indonesia.²

Menjelang akhir Perang Dunia ke-II kesadaran nasional dan nasionalisme Indonesia itu telah mencapai puncaknya. Para pemimpin bangsa menyiapkan proklamasi kemerdekaan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk negara nasional, antara lain menyusun rancangan UUD dan rancangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia Merdeka. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa para pemimpin yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun rancangan-rancangan itu dan dalam Panitia Persiapan Kemer-

1 Mengenai alasan-alasan mengapa pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia lihat Zuber Usman, *op. cit.* hal. 23-30 dan 64-68; lihat juga Zuber Usman, *Bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi Lingua Franca* (Jakarta, 1977)

2 Lihat Umar Junus. *op. cit.*, hal. 39-68

ANALISA

dekaan Indonesia yang mengesahkannya menjadi UUD berasal dari berbagai kelompok etnis dan dianggap sebagai mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan geografis, etnis dan historis mereka memutuskan bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh kepulauan Nusantara dan rakyatnya seluruh penduduk Nusantara.¹

Sebagai puncak pergerakan nasional itu, pada 17 Agustus 1945 terjadi Proklamasi Kemerdekaan dan lahirlah Negara Indonesia sebagai negara nasional yang meliputi seluruh Nusantara dan penduduknya. Sehari kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Rancangan UUD tersebut menjadi UUD. Seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD itu, Indonesia Merdeka dibangun atas dasar Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dipadatkan dan dimurnikan menjadi dasar falsafah negara modern. Salah satu dari kelima sila Pancasila ialah persatuan atau kebangsaan Indonesia, yang mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, satu negara bangsa yang terdiri atas berbagai suku. Berkat perjuangan kaum nasionalis Indonesia, bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara secara berangsur-angsur bersatu menjadi satu bangsa dan satu negara. Sebagai akibatnya bangsa-bangsa itu kehilangan kedudukan mereka sebagai bangsa dan menjadi suku-suku bangsa.

Dengan proklamasi kemerdekaan itu perjuangan nasional mencapai puncaknya, tetapi belum selesai. Penduduk Indonesia telah menjadi satu bangsa yang sadar akan diri serta kesatuannya dan berhasil membentuk negara nasional Persatuan dan kesatuan berbagai suku dan golongan telah menjadi kenyataan, tetapi belum sempurna dan masih harus dibina terus menerus agar menjadi semakin kokoh. Kesadaran nasional harus dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut tetapi juga harus dimurnikan. Tendensi-tendensi untuk mengutamakan suku dan daerah di atas bangsa tidak lenyap begitu saja dengan Proklamasi

¹ Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, I (Jakarta, 1971), hal. 143-437; lihat juga Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta, 1970)

Kemerdekaan. Lagi pula keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah tidak mudah diketemukan dan tidak mudah dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh daerah yang bersangkutan. Karya nation-building harus diteruskan dengan meningkatkan persatuan dan memajukan kerukunan, kerjasama, integrasi dan asimilasi antar suku dan antar golongan, tetapi perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah serta kelompok yang sah tidak boleh dihapus.

Selama 33 tahun sebagai negara merdeka, Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam hal itu. Di berbagai daerah muncul gerakan-gerakan separatis yang kadang-kadang disertai kekerasan senjata, yang membahayakan persatuan bangsa dan negara, lagi pula menghambat pembangunan nasional yang harus dilakukan untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Akan tetapi berkat kebijaksanaan Pemerintah dan ketegasan ABRI serta dukungan rakyat bagi Pemerintah, gerakan-gerakan yang membahayakan eksistensi negara itu dapat diatasi dengan baik. Negara berhasil mempertahankan kesatuan rakyat dan wilayahnya serta menegakkan kedaulatannya di seluruh Nusantara.¹

Namun kita harus tetap waspada terhadap bahaya-bahaya yang dapat mengancam kesatuan nasional kita. Kepada seluruh rakyat diminta agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan dan keretakan persatuan itu, lagi pula memajukan hal-hal yang dapat membina dan mengembangkannya. Seluruh rakyat harus selalu menyadari bahwa makin kuat persatuan nasional kita makin besar pula kemampuan negara kita untuk menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan-tujuan nasional "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".²

1 Lihat Harsja W. Bachtiar, *op. cit.*, khususnya hal. 28-32

2 Pembukaan UUD 1945

ANALISA

Dalam rangka itu negara wajib mencegah atau mengatasi perpecahan dan pertentangan antara sesama golongan dan antara sesama warganegara, lagi pula mempertebal persatuan nasional. Sehubungan dengan itu apa yang telah dirumuskan dalam GBHN 1978 mengenai "Wawasan Nusantara" harus dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.¹ Indonesia telah merupakan suatu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan-keamanan. Akan tetapi kesatuan multi dimensi itu harus dibina dan ditingkatkan secara terus menerus, agar menjadi semakin kokoh dan semakin operasional. Persatuan nasional adalah syarat mutlak bagi kelangsungan negara dan sukses perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Persatuan nasional Indonesia telah menghasilkan satu bangsa dan satu negara nasional. Adanya negara nasional selanjutnya menuntut adanya kesatuan intern dan kemerdekaan terhadap negara-negara lain, tetapi tidak secara mutlak. Kesatuan intern yang mutlak, yang tidak mengakui perbedaan apapun, adalah paksaan yang menindas kemerdekaan perorangan dan otonomi yang sah dari golongan-golongan serta kelompok-kelompok, sedangkan kemerdekaan mutlak yang tidak peduli akan negara-negara lain menjurus kepada imperialisme. Kebangsaan Indonesia menolak kedua sikap ekstrim itu dengan mengakui adanya perbedaan-perbedaan ke dalam dan menghormati hak-hak bangsa-bangsa lain. Kebangsaan Indonesia menempuh jalan tengah. Ke dalam dia menolak kesatuan mutlak maupun separatisme dan pertentangan-pertentangan antar suku dan antar golongan. Ke luar dia menolak baik isolasionisme maupun imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitanisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional. Sebaliknya persatuan nasional Indonesia ke dalam mewajibkan negara untuk membiarkan otonomi daerah-daerah, mengakui dan menghormati hak-hak minoritas-minoritas, menghormati adat istiadat yang beraneka ragam, bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan daerah, menghormati agama-agama dan menerima paling tidak dua partai politik. Keluar dia mewajibkan negara untuk menjalin

1 Lihat TAP IV/MPR/1978

hubungan baik dan bekerjasama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menguntungkan dan saling menghormati dan keadilan sosial antar bangsa.¹

Dalam rangka itu bangsa Indonesia telah memiliki banyak hal yang sangat menguntungkan, khususnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup serta moral bangsa, UUD 1945, satu bahasa nasional untuk seluruh wilayah negara, satu bendera, satu lagu kebangsaan, satu pemerintah dan satu angkatan bersenjata. Proses integrasi bangsa lewat asimilasi warganegara keturunan asing dan perkawinan antar suku dan antar golongan yang semakin banyak terjadi juga merupakan faktor-faktor yang positif. Semuanya itu harus dimanfaatkan sepenuhnya. Demikianpun harus digalakkan usaha-usaha untuk membentuk dan mengembangkan kebudayaan nasional serta pendidikan nasional, yang memegang peranan yang sangat penting dalam memelihara dan meningkatkan persatuan nasional.

¹ Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1954), hal. 76-80

ANALISA

Lampiran

"PUTUSAN KONGRES PEMUDA-PEMUDI INDONESIA

Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanya *Jong Java*, *Jong Sumatra* (Pemuda Sumatra), Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia;

Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta; Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi;

Sesudah menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini;

Kerapatan lalu mengambil keputusan:

- Pertama : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, TANAH INDONESIA.
- Kedua : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA YANG SATU, BANGSA INDONESIA.
- Ketiga : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya:

KEMAUAN

SEJARAH

BAHASA

HUKUM ADAT

PENDIDIKAN DAN KEPANDUAN,

dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan."

Dikutip dari buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974), hal. 69